

KAPABILITAS BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK TERLANTAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

THE CAPABILITY OF THE SOCIAL REHABILITATION AND CHILDCARE CENTER IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Oleh: Dita Melliana dan Dra. Fransisca Winarni, M.Si, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, melliana700@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapabilitas maupun faktor penghambat kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Urgensi penelitian ini dilakukan karena masih ditemukan permasalahan dalam menangani anak terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial milik pemerintah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan dengan teknik triangulasi sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis interaktif model Miles and Hubermans. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan relatif baik, hanya sumber daya manusia yang masih kurang. Hal ini diukur berdasarkan indikator kapabilitas menurut kusumasari yaitu kelembagaan, adanya struktur organisasi dan pembagian tugas wewenang yang jelas; teknis, adanya pemanfaatan sistem teknologi untuk mendukung penanganan rehabilitasi sosial; sumber daya manusia, sumber daya manusia masih kurang jumlahnya terutama pekerja sosial; keuangan, ketersediaan jumlah alokasi anggaran sudah mencukupi; Implementasi kebijakan, adanya kebijakan yang mendukung rehabilitasi sosial anak terlantar; kepemimpinan, sikap dari Kepala Balai dalam mengambil keputusan mampu mendukung penanganan anak terlantar. Adapun faktor penghambat kapabilitas diantaranya Pramu sosial memiliki pendidikan yang masih rendah, kurangnya kesadaran dan kemauan anak terlantar dalam mematuhi prosedur rehabilitasi sosial. Kontribusi hasil penelitian ini sebagai masukan untuk evaluasi kinerja Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam meningkatkan kapabilitasnya.

Kata Kunci: Kapabilitas, Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, Anak Terlantar

Abstract

The purpose of this study is to examine the capability and inhibiting factors of the capability of the social rehabilitation and childcare center in the special region of Yogyakarta. The urgency of this research was carried out because problems were still found in dealing with neglected children at the Social Rehabilitation and Childcare Center as a government owned social welfare institution. The methodology used in collecting the data in this research was including observation, interview, and documentation. Moreover, the data in this paper were validated by triangulation technique and analyzed by interactive analysis model of Miles and Hubermans. The result of this research indicates that the capability of the Social Rehabilitation and Childcare Center in Special Region of Yogyakarta is relatively appropriate with the regulation standard, it just indicates an obstacle in the human resources. It is proven by Kusumasari's capability indicators that consist of the institution indicator which shows the availability of the organization structure, the clear authority job distribution; the technical indicator that represents the use of technological systems to support in the organization of the social rehabilitation; the human resources that reflects the deficiency of human resources especially in the social worker; the financial that asserts the availability of the sufficient; the policy implementation which indicates the availability of policies to manage the homeless children; and the leadership that indicates the supportive attitude in decision-making from the chief of the rehabilitation center in supporting the management of the homeless children. The inhibiting factors of capability are the social education is still low and the lack of awareness of neglected children. The contribution of the result of this study as an evaluation for Social Rehabilitation and Chilcare Center in increasing its capabilities.

Key words: Capability, The social rehabilitation and childcare center, Homeless children

PENDAHULUAN

Mewujudkan kesejahteraan sosial anak merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi setiap anak di Indonesia. Pada hakikatnya anak memiliki peran penting dalam strategi pembangunan nasional, sehingga negara menjamin setiap anak jauh dari permasalahan kesejahteraan sosial terutama keterlantaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Dasar Nomor 34 Ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Adanya konstitusi perlindungan anak belum tentu menjamin kesejahteraan sosial anak. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial anak masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran hak anak jika dibandingkan pada tahun 2017. KPAI merinci peningkatan permasalahan anak berhadapan dengan hukum 1.434 kasus, kasus terkait kelurga dan pengasuhan 857 kasus, pornografi dan *cyber crime* 679 kasus, NAPZA 364 kasus, kasus *trafficking* dan eksploitasi 329 kasus, Bidang pendidikan 451 kasus, bidang sosial dan anak dalam situasi darurat 302 kasus, serta bidang agama dan budaya 246 kasus (Halim,2019).

Permasalahan anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak tertinggi. Anak terlantar merupakan suatu kondisi permasalahan kesejahteraan sosial pada anak dimana anak tidak mendapatkan kesejahteraan sebagaimana mestinya untuk tumbuh dan berkembang dengan layak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di D.I.Yogyakarta menduduki peringkat pertama adalah anak terlantar dengan jumlah 13.009 anak, kemudian anak disabilitas berjumlah 3.708 anak, Balita terlantar berjumlah 762 anak, anak jalanan berjumlah 670 anak, Anak berhadapan dengan hukum berjumlah 101 anak, dan anak korban tindakan kekerasan berjumlah 11 anak.

Jumlah anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama empat tahun terakhir mulai dari tahun 2015-2018 masih cukup tinggi. Pada tahun 2015 berjumlah 20.089 anak terlantar, kemudian pada tahun 2016 berjumlah 14.450 anak terlantar, tahun 2017 berjumlah 11.960 anak terlantar dan tahun 2018 berjumlah 13.009 anak terlantar. Persebaran jumlah anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut : Kabupaten Gunungkidul berjumlah 3.409 anak atau 30,9 persen,

Kapabilitas Balai Rehabilitasi ... (Dita Melliana dan Dra. Fransisca Winarni, M.Si)

Kabupaten Bantul berjumlah 1.788 anak atau 25,3 persen, Kabupaten Sleman berjumlah 2.784 anak atau 25,3 persen, Kabupaten Kulon Progo berjumlah 2.844 anak atau 25,8 persen, dan Kota Yogyakarta berjumlah 184 anak atau 1,67 persen (Sumber data: Dinas Sosial DIY, 2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar dapat dilaksanakan melalui pelayanan sosial dengan rehabilitasi sosial maupun jaminan sosial. Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat sedangkan jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dengan adanya pelayanan sosial yang diberikan kepada anak terlantar merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin penghidupan yang layak bagi anak di Indonesia. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan sosial anak terlantar pemerintah dapat melaksanakannya melalui lembaga kesejahteraan sosial. Lembaga kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam menjamin penghidupan yang layak

bagi penyandang masalah sosial, konteks permasalahan ini adalah anak terlantar.

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan sosial anak sekaligus salah satu unit pelaksana teknis Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak adalah menjadi lembaga kesejahteraan sosial anak profesional yang mampu mengentaskan anak dari keterlantaran, perilaku salah, serta memberikan perlindungan dan bimbingan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak mandiri dan bertanggung jawab. Adanya Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah permasalahan anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pelaksanaan rehabilitasi sosial. Dalam mewujudkan tujuan penanganan anak terlantar Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak mengalami beberapa permasalahan.

Permasalahan tersebut diantaranya, sumber daya manusia dalam menangani anak terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak masih kurang terutama pekerja sosial. Hal tersebut menjadikan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak mengalami hambatan

Kapabilitas Balai Rehabilitasi ... (Dita Melliana dan Dra. Fransisca Winarni, M.Si)

untuk menangani anak terlantar secara teknis karena kurangnya sumber daya manusia. Permasalahan lainnya yaitu terkait dengan kompetensi pramu sosial atau pengasuh di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak masih rendah. Adanya permasalahan tersebut akan berdampak pada kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani anak terlantar.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan cara meningkatkan kapabilitas organisasi terutama dalam lembaga kesejahteraan sosial. Kapabilitas organisasi merupakan kemampuan yang dimiliki organisasi untuk menjalankan tujuan dan fungsinya untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditetapkan sebelumnya (Mahyudi, 2010:316). Kapabilitas atau kemampuan dalam organisasi dapat digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah organisasi. Hal ini disebabkan faktor pendukung kapabilitas sebuah organisasi adalah sumber daya-sumber daya yang dimiliki organisasi seperti sumber daya manusia, teknis, keuangan, kepemimpinan, implementasi kebijakan, kelembagaan (Kusumasari,2014:48). Kapabilitas lembaga kesejahteraan sosial memiliki peran strategi untuk pembangunan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan melihat berbagai latar belakang

terkait permasalahan anak terlantar dan perlunya jaminan pelayanan sosial maka Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial sekaligus menjadi *pilot project* lembaga kesejahteraan sosial anak seharusnya memiliki kapabilitas yang baik untuk menjamin kesejahteraan sosial anak bagi anak terlantar.

Urgensi penelitian ini dilakukan karena Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial D.I.Yogyakarta sekaligus Lembaga Kesejahteraan Sosial milik pemerintah masih ditemui permasalahan dalam menangani permasalahan anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan di atas dalam penelitian yang berjudul “Kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengetahui faktor penghambat kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kontribusi penelitian hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk evaluasi kinerja Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam

Kapabilitas Balai Rehabilitasi ... (Dita Melliana dan Dra. Fransisca Winarni, M.Si)

menangani anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta guna meningkatkan kapabilitas sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial anak yang berada dalam tanggung jawab pemerintah.

Mahyuddin (2010:314) menjelaskan bahwa kapabilitas organisasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan tujuan dan fungsinya untuk menacapai tujuan spesifik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya Sampurno (2011:52) menjelaskan kapabilitas organisasi dalam menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi. Hal ini juga sependapat yang dikemukakan oleh Makadok dalam Kusumasari (2014:44) mendefinisikan kapabilitas organisasi sebagai jenis khusus dari sumber daya yang tidak dapat diganti dan melekat pada organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lainnya.

Menurut Sampurno (2011:50) faktor pendukung kapabilitas meliputi: wujud yaitu: (1) keuangan, (2) fisik (gedung, peralatan), (3) nirwujud yaitu teknologi, reputasi, budaya, dan (4) manusia yaitu keterampilan, motivasi.

Kusumasari (2014:48) menjelaskan bahwa untuk menilai kapabilitas organisasi dapat diukur dengan indikator :

1. Kelembagaan

Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level *stakeholder*.

2. Sumber Daya Manusia

Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas. Indikator analisis pengukuran yaitu terkait jumlah sumber daya manusia yang dimiliki beserta distribusi sumber daya manusia di setiap instansi.

3. Implementasi Kebijakan

Tersedianya peraturan Undang-undang, kebijakan dan peraturan baik pusat maupun daerah sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainnya serta untuk memobilisasi sumber daya.

4. Keuangan

Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas. Indikator analisis pengukuran yaitu terkait ketersediaan sumber daya keuangan beserta jumlah anggaran yang dialokasikan.

5. Teknis

Memiliki sistem logistik manajemen dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin *network* dengan berbagai *stakeholders*. Indikator analisis pengukuran yaitu terkait ketersediaan sistem logistik

manajemen dan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berhubungan dengan para *stakeholders* beserta kepuasaan *stakeholders* dalam menggunakan atau mengakses sistem logistik tersebut.

6. Kepemimpinan

Memiliki kapasitas kepemimpinan yang dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat. Indikator analisis pengukuran yaitu terkait cara pemimpin mengambil keputusan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan hasil penelitian yaitu pada Bulan September 2019 sampai dengan Bulan Februari 2020.

Tempat penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak.

Subjek Penelitian

Kepala Seksi Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, Koordinator Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, Analis Perencana Program dan Anggaran Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, Bendahara Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, Pramur Sosial Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, Anak Terlantar dalam Balai, Alumni Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Data Dinas Sosial DIY tentang jumlah anak terlantar 2016-2018, cakupan kualitas pelayanan lembaga kesejahteraan sosial 2015-2019, data berita nasional Kompas terkait dengan pelanggaran hak anak di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Sugiyono (2011:229) menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung tanpa menggunakan alat bantu guna mengetahui sifat subyek, perilaku, dan kegiatan yang sedang berlangsung. Objek observasi dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen

yaitu tempat, perilaku, dan aktivitas. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan pedoman observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Wawancara

Moleong (2014:186) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu orang yang akan mengajukan pertanyaan dan orang yang akan di wawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung pihak terkait yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, dengan mengajukan pertanyaan.

3. Dokumentasi

Moleong (2014:216) menjelaskan bahwa Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yang setiap bulan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder.

Teknik Analisis Data

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi sumber. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan pendapat dari informan

yang berbeda. Kemudian data-data yang ada dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan. Setelah data di lapangan dinilai sudah valid, peneliti membandingkannya lagi dengan dokumen-dokumen pendukung.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan anak yang tergolong cukup tinggi. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan sosial anak termasuk anak terlantar melalui balai tersebut. Dalam upaya untuk mengetahui kemampuan penanganan anak terlantar di dalam Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak erat kaitnya dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan rehabilitasi sosial dan pengasuhan.

Oleh karena itu, kemampuan dalam menggunakan sumber daya perlu dipahami

secara mendalam dengan menganalisis mengenai kapabilitas guna melihat sejauh mana kesiapan dan persiapan yang dimiliki Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Indikator Kelembagaan

Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang memiliki arti aturan dalam suatu organisasi untuk membantu anggotanya agar mampu bekerja sama sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Kelembagaan dalam sebuah organisasi memiliki peran penting untuk memastikan sumber daya-sumber daya yang dimiliki organisasi dapat berjalan secara lancar.

Kusumasari (2014:48) menjelaskan bahwa sumber daya dan faktor terpenting dalam menilai kapabilitas kelembagaan yaitu pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level *stakeholder*.

Kapabilitas kelembagaan penanganan anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak ditunjukkan dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial yang memuat struktur organisasi Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak beserta pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing kedudukan maupun jabatan. Selain itu, untuk mendukung kapabilitas kelembagaan terkait menjalin *networking* dengan semua level *stakeholder*, Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan jejaringan secara internal maupun eksternal.

Secara internal seperti koordinasi dalam setiap tahap kegiatan baik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan melibatkan semua tingkat jabatan atau level *stakeholder* dalam Balai sedangkan secara eksternal menjalin *networking* dengan beberapa stakeholder diluar Balai seperti : Lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, LSM, satpol PP, kepolisian, TNI, lembaga sosial lainnya.

2. Indikator Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi merupakan bagian terpenting untuk mendukung keberlangsungan kegiatan organisasi. Salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan sebuah organisasi ditentukan oleh kapabilitas sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Indikator sumber daya manusia dapat

Kapabilitas Balai Rehabilitasi ... (Dita Melliana dan Dra. Fransisca Winarni, M.Si)

dimaknai untuk mengetahui seberapa banyak ketersediaan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi.

Kusumasari (2014:48) menjelaskan bahwa indikator sumber daya manusia analisis pengukurannya terkait dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki beserta distribusi sumber daya manusia di setiap instansi.

Kapabilitas sumber daya manusia di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang jumlah sumber daya manusianya terutama pekerja sosial. Hal ini dikarenakan jumlah pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak belum sesuai dengan jumlah penanganan permasalahan sosial anak. Secara aturannya satu pekerja sosial menangani 5 sampai dengan 10 orang penyandang masalah sosial mulai dari proses assesmen hingga proses rehabilitasi sosial dinyatakan selesai. Berbeda yang terjadi di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak satu pekerja sosial menangani 17 anak terlantar. Adanya pekerja sosial menjadi peran penting dalam rehabilitasi sosial anak terlantar, Pekerja sosial memiliki pekerjaan dan delegasi yang jelas terkait dengan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Secara keahlian profesi pekerja sosial sudah dipersiapkan untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Indikator Implementasi Kebijakan

Permasalahan anak terlantar merupakan salah satu permasalahan yang menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial umum sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara melakukan upaya untuk menangani permasalahan tersebut melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan adanya rehabilitasi sosial maupun jaminan sosial di dalam lembaga kesejahteraan sosial. Dengan begitu, maka suatu negara harus memiliki sistem regulasi atau kebijakan yang mengatur.

Ketersediaan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan satu hal terpenting untuk digunakan sebagai pedomanan penyelenggara organisasi, dengan adanya kebijakan maka suatu organisasi memiliki batasan-batasan atau koridor dalam menjalankan tugasnya.

Kusumasari (2014:48) menjelaskan bahwa sumber daya dan faktor terpenting untuk menilai kapabilitas implementasi kebijakan yaitu ketersediaannya Undang-Undang, kebijakan dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainnya serta untuk memobilisasi sumber daya.

Kapabilitas implementasi kebijakan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta adanya

Kapabilitas Balai Rehabilitasi ... (Dita Melliana dan Dra. Fransisca Winarni, M.Si)

ketersediaan kebijakan pusat maupun daerah untuk mendukung penanganan anak terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak. Kebijakan pusat meliputi : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Sedangkan kebijakan daerah meliputi : Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial.

4. Indikator Keuangan

Ketersediaan dana dalam penanganan anak terlantar merupakan hal yang terpenting. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak terlantar baik sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang semestinya didapatkan oleh setiap anak terlantar.

Kusumasari (2014:48) menjelaskan bahwa untuk menilai kapabilitas keuangan yaitu memiliki dukungan keuangan yang

memadai untuk mendukung semua aktivitas.

Kapabilitas keuangan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian untuk jumlah dana yang digunakan dalam penanganannya terlantar jumlahnya dapat naik maupun turun tergantung dari pengajuan perencanaan keuangan awal dengan mempertimbangkan kebutuhan anak terlantar. Tahun 2018 anggaran anak terlantar berjumlah Rp 859.981.570 kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu Rp 1.183.568.570 dan tahun 2020 anggaran dengan jumlah Rp 1.538.055.570.

5. Indikator Teknis

Dalam organisasi pelayanan publik dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik secara efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan organisasi publik untuk mendukung pelayanan publik yang baik dapat menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Selain untuk menciptakan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien, penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki peran penting untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan para aktor.

Kapabilitas Balai Rehabilitasi ... (Dita Melliana dan Dra. Fransisca Winarni, M.Si)

Kusumasari (2014:48) menjelaskan bahwa sumber daya dan faktor penting dalam menilai kapabilitas teknis yaitu memiliki sistem logistik manajemen dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin *network* dengan berbagai *stakeholder*.

Kapabilitas teknis Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mengenai penggunaan sistem teknologi untuk mendukung kapabilitas teknik dalam rehabilitasi dan pengasuhan anak terlantar yaitu menggunakan CCTV untuk menunjang pengawasan anak, ketersediaan laptop, printer, menunjang kebutuhan pendidikan anak terlantar, serta ketersediaan fasilitas lainnya seperti, mesin cuci dan telepon kantor. Sedangkan sistem koordinasi atau manajemen antar *stakeholder* dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu menggunakan sosial media melalui *grub-grub whatshap*, media telepon, email, maupun website resmi.

6. Indikator Kepemimpinan

Kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peran penting untuk mengatur jalannya pencapaian tujuan organisasi serta memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat.

Kusumasari (2014:48) menjelaskan bahwa dalam menilai kapabilitas

kepemimpinan yaitu memiliki kapasitas kepemimpinan yang dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat. Pemimpin memiliki peranan penting dalam suatu organisasi, misalnya dalam penyelenggaraan pemerintah. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan teori kepemimpinan menurut Terry (Thoha,2010:5) yang mengartikan kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Kapabilitas kepemimpinan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu penanganan anak terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh kepala Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak sebagai pemimpin. Dimana terdapat model pengambilan keputusan Kepala Balai dilakukan bersifat partisipatif dengan melibatkan bawahan-bawahannya untuk mempertimbangkan masukan-masukan guna mendapatkan hasil keputusan yang

komperhensif dan tepat. Sebagai contohnya adalah untuk melakukan proses rehabilitasi sosial di Balai untuk anak terlantar harus melalui beberapa tahapan salah satunya yaitu assesmen. Assesmen merupakan proses mengidentifikasi latar belakang anak, keluarga serta lingkungan sekitar untuk mendapatkan informasi untuk menetapkan anak tersebut layak dilakukan rehabilitasi sosial atau tidak.

Pengambilan keputusan dalam hal tersebut dilakukan melalui tahapan case conference atau rapat dengan beberapa *stakeholder* untuk memutuskan anak tersebut layak atau tidak dilakukan rehabilitasi. Dalam tahapan tersebut pemimpin Balai memiliki peran penting untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan beberapa *stakeholder*. Selain itu dalam kondisi darurat Kepala Balai dapat mengambil keputusan secara cepat. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pengambilan keputusan secara cepat biasanya dilakukan oleh Kepala Balai untuk kondisi yang mendesak seperti tindakan yang harus diambil cepat apabila menemui permasalahan anak terlantar akibat korban kekerasan dari keluarga, sehingga dalam hal ini Kepala Balai secara cepat mengambil alih

Faktor Penghambat Kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan

Anak Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak memiliki peran penting sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan anak terlantar, terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar anak terlantar. Untuk memaksimalkan penanganan anak terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak perlu diketahui faktor penghambat agar dapat dijadikan bahan evaluasi sehingga diharapkan dapat memudahkan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak untuk mencapai kapabilitasnya dalam lembaga kesejahteraan sosial milik pemerintah untuk menangani permasalahan anak terlantar. Faktor penghambat Kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan pramu sosial masih rendah

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak melakukan strategi untuk melakukan penambahan tenaga honorer untuk mensiasati kurangnya pekerja sosial melalui pramu sosial atau pengasuh. Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan bahwa pramu sosial di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak masih rendah kompetensinya.

Kapabilitas Balai Rehabilitasi ... (Dita Melliana dan Dra. Fransisca Winarni, M.Si)

Permasalahan ini memiliki relevansi dengan adanya hambatan yang terjadi dalam penanganan anak terlantar yaitu tingkat pendidikan pramu sosial atau pengasuh masih rendah.

Mayoritas pramu sosial atau pengasuh di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan anak memiliki latar belakang pendidikan yang masih rendah seperti lulusan akhir dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini pastinya akan berbeda dari sisi pengetahuannya dengan tenaga kesejahteraan sosial yang sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam jenjang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan profesi penanganan permasalahan sosial. Dengan demikian tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pramu sosial atau pengasuh dalam Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak akan berdampak pada kompetensi yang dimiliki pramu sosial, seperti kompetensi yang harus dikuasai sebagai tenaga kesejahteraan sosial terutama dalam penanganan anak terlantar.

2. Kurangnya kesadaran dan kemauan anak terlantar dalam mematuhi peraturan

Setiap anak memiliki ciri karakteristik sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Kondisi ini menjadikan tantangan dalam pengasuhan dan rehabilitasi sosial dalam Balai. Jumlah anak terlantar di Balai yang banyak menyebabkan para pengasuh

mengalami kesulitan dalam mendidik maupun membina anak terlantar.

Adanya pelanggaran anak terlantar seperti melarikan diri dari Balai, mencuri, membolos sekolah. Oleh karena itu kurangnya kesadaran dan kemauan anak terlantar akan menghambat proses rehabilitasi sosial yang berdampak pada kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani anak terlantar.

SIMPULAN

Kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan relatif baik, meskipun ada kekurangan. Hal tersebut dapat diketahui secara terperinci sebagai berikut :

Pertama, kapabilitas kelembagaan, dari segi pengaturan kelembagaan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani anak terlantar sudah berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan adanya susunan organisasi beserta tugas sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua, kapabilitas sumber daya manusia yang menangani anak terlantar tergolong masih kurang. Hal ini terbukti dengan jumlah pekerja sosial yang dimiliki oleh Balai Rehabilitasi Sosial dan

Kapabilitas Balai Rehabilitasi ... (Dita Melliana dan Dra. Fransisca Winarni, M.Si)

Pengasuhan Anak belum sesuai dengan standar jumlah penangan anak terlantar.

Ketiga, kapabilitas implementasi kebijakan, dari segi ketersediaan kebijakan daerah yang dimiliki pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya kebijakan yang mendukung adanya penanganan anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keempat, kapabilitas keuangan, dari segi sumber dan jumlah dana yang digunakan dalam mendukung penanganan anak terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak tergolong sudah mencukupi. Hal ini terbukti dengan manajemen pengelolaan keuangan yang baik.

Kelima, kapabilitas teknis, dari segi logistik sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam penanganan anak terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak tergolong sudah mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penanganan anak terlantar dan untuk mengakomodasi komunikasi *stakeholder*.

Keenam, kapabilitas kepemimpinan, dari segi pengambilan keputusan tergolong sudah mampu mengambil keputusan

dengan cepat dan tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap responsif Kepala Balai terhadap kebutuhan yang bersifat *urgent*. Selain itu, dalam membuat keputusan Kepala Balai bersifat partisipatif yaitu membuka ruang pendapat kepada bawahnya maupun beberapa *stakeholder* untuk ikut terlibat.

Faktor penghambat kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tingkat pendidikan pramu sosial tau pengasuh yang masih rendah, kurangnya kesadaran dan kemauan anak terlantar dalam mematuhi peraturan rehabilitasi sosial.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki beberapa saran yang perlu disampaikan untuk meningkatkan kapabilitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembekalan dan pelatihan kompetensi dasar bagi pramu sosial, agar secara keilmuan dalam menangani anak terlantar dapat dipahami dengan baik oleh pramu sosial.
2. Perlu adanya pendampingan ahli psikologi untuk memahami kepribadian masing-masing anak

Kapabilitas Balai Rehabilitasi ... (Dita Melliana dan Dra. Fransisca Winarni, M.Si)

terlantar, agar dalam pengasuhan anak terlantar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Perlu adanya pembinaan secara intensif dan personal untuk anak-anak terlantar yang sulit pengasuhannya di dalam Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen*

Bencana dan Kapabilitas

Pemerintah Lokal. Yogyakarta :

Penerbit Gava Media

Mahyuddin, Hasbi. 2010. *Kapabilitas*

Organisasi Publik. Jurnal Ilmu

Sosial. Universitas Hassanudin

Makassar, 7 (1), 313-320

Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan*

dalam Manajemen. Raja Grafindo

Persada

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi*

Penelitian Kualitatif. Bandung:

Remaja Rosda Karya

Sampurno. 2011. *Manajemen Strategi*.

Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian*

Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Undang-Undang Dasar 1945 Republik

Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008

tentang Rincian tugas dan fungsi

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD)

Dinsos.Jogjapro.go.id. 2019. Data

permasalahan kesejahteraan sosial

pada tahun 2018 dan Unit Pelaksana

Teknis Dinas (UPTD). Diakses pada

20 September 2019 pukul 19.00 WIB

Halim. 2019. Kompas.com. 2018. KPAI:

Jumlah Pelanggaran hak anak

mengalami peningkatan. Diakses

pada 2 November 2019 pukul 13.00

WIB